



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 142 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja 117);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 117 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WANARAJA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 117) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 142

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 142 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 117
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN WANARAJA
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	1
--	---

berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	2
--	----------

terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	3
--	---

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	4
---	---

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	5

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	6

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	7

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut

- Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati

Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

32. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

33. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.
- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	10
--	----

- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanaraja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	11
--	----

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanaraja
sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian
Renstra**

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	12
---	----

Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Bulan Desember 2022

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7.01.7.01.42.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	2.045.856.105	1.910.865.708	93,4
7.01.7.01.42.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.560.000	5.560.000	100
7.01.7.01.42.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.697.617.295	1.573.875.128	92,7
7.01.7.01.42.01.2.02.05	Koordinasi dan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	5.560.000	5.560.000	100
7.01.7.01.42.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	7.020.000	7.020.000	100
7.01.7.01.42.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	17.029.600	17.029.600	100
7.01.7.01.42.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.815.426	5.815.426	100
7.01.7.01.42.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.724.800	11.724.800	100
7.01.7.01.42.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	22.000.000	100
7.01.7.01.42.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	21.980.000	19.600.000	89,1

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Konsultasi SKPD			
7.01.7.01.42.01.2.07.05	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	86.846.800	86.466.167	99,5
7.01.7.01.42.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	14.806.284	9.097.287	61,4
7.01.7.01.42.01.2.08.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.390.000	2.390.000	100
7.01.7.01.42.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	17.943.900	17.933.900	99,9
7.01.7.01.42.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	13.550.000	11.628.200	85,8
7.01.7.01.42.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan Dinas oprasional atau lapangan.	16.012.000.	15.288.000	95,4
07.01.7.01.42.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100.000.000	99.824.000	99,8
7.01.7.01.42.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	229.613.000	217.612.800	94,7
7.01.7.01.42.02.2.01.02	Peningkatan efektifitas	73.415.800	73.415.800	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan			
7.01.7.01.42.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	156.197.200	144.197.000	92,3
7.01.7.01.42.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.780.000	3.780.000	100
7.01.7.01.42.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	3.780.000	3.780.000	100
7.01.7.01.42.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71.100.000	64.900.000	91,2
7.01.7.01.42.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	64.900.000	62.500.000	96,3
7.01.7.01.42.04.2.01.02.	Harmonisasi hubungan tokoh agama dan tokoh masyarakat	6.200.000	2.000.000	32,2
7.01.7.01.42.05	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	212.990.000	212.990.000	100
7.01.7.01.42.05.2.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12.990.000	12.990.000	100
7.01.7.01.42.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas Forum koordinasi	200.000.000	200.000.000	100

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	pimpinan di Kecamatan			
7.01.7.01.42.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.863.200	47.863.200	100
7.01.7.01.42.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.910.300	15.910.300	100
7.01.7.01.42.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan tugas , fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	15.111.600	15.111.600	100
7.01.7.01.42.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	16.841.300	16.841.300	100

Sumber : LRA bulan Desember 2022

Dari tabel diatas, menggambarkan perbandingan pagu indikatif Renstra Tahun 2023 terhadap realisasi APBD TA. 2023, dari total pagu indikatif Renstra Tahun 2023 sebesar Rp. 4.923.133.071,00 melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja Tahun 2022 dalam pelaksanaannya pada APBD TA. 2023, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.359.528.726,00 atau sebesar 28,00%.

2.1.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENSTRA

Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program RENSTRA dapat diwujudkan. Berdasarkan data hasil evaluasi Renja Tahun 2023, diperoleh rata-rata tingkat capaian RENSTRA s.d. Triwulan II Tahun 2023 adalah 80,27% untuk target kinerja dan 28,00% untuk target anggaran.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	16
---	----

Tabel 2.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
RENSTRA Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Kecamatan									
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	500	100	100	88,31	88,31	100	288,31	57,66
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	170	34	34	34	100	17	85,00	50,00
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Pelaksanaan Administrasi	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	17
---	----

					Daerah	Umum Perangkat Daerah									
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	55	11	11	11	100	10	32,00	58,18	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	160	32	32	32	100	41	105,00	65,63	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan	80	16	16	16	100	16	48,00	60,00	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	60	7	7	7	100	12	26,00	43,33	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa	360	72	72	72	100	72	216,00	60,00	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan	6820	1364	1364	1.364	100	1364	4092,00	60,00	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2680	536	536	536	100	600	1672,00	62,39	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan	6	2	1	1	100	1	4,00	66,67	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Memadai	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	40	12	12	12	100	3	27,00	67,50	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan	60	8	8	8	100	12	28,00	46,67	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan	30	5	7	7	100	8	20,00	66,67	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Pembayaran STNK, Jumlah Servis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sesuai Kebutuhan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00	

					Dinas Jabatan														
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan	10	2	2	2	100	1	5,00	50,00					
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	500	100	100	97,79	97,79	100	297,79	59,56					
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00					
7	01	01	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitas Kegiatan Keagamaan, Fasilitas Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat	45	9	9	9	100	8	26,00	57,78					
7	01	01	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00					
7	01	01	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan	8	0	0	0	100	2	2,00	25,00					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100	100	100	100	99,59	100	300,00	60,00					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen RPTK	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00					
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00					
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan TP.PKK tingkat Kecamatan	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	500	100	100	99,28	99,28	100	299,28	59,86					

7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	500	100	100	100	99,96	100	300,00	60,00
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	500	100	100	100	100	100	300,00	60,00
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan trantibum	60	12	12	12	100	12	36,00	60,00

Sumber : PERUBAHAN RENSTRA Tahun 2019-2024 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	20
---	----

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat Kecamatan	1.	Nilai SKM	Nilai	83,5	84,41	106,07	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2.	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	82,5	82,5	100,00	Tercapai
3	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Desa/Desa	3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	85	85	100,00	Tercapai
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	4.	Nilai SAKIP Kecamatan	Predikat	BB	BB	100,00	Tercapai

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan bidang urusan pemerintahan adalah 2,18%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD namun kegiatan tersebut tidak ada dalam RKPD, maka realisasi kegiatan tersebut tidak mempengaruhi realisasi RKPD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 2,18% untuk target kinerja, dan 27,16% untuk target anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa yang sudah proses masih rendah. Apabila dilihat berdasarkan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	21
---	----

pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.4
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program
Renja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			82,5	82,5	83	83	82,9 1	84.81	83	83	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			82,5	85	87,5	90	82,5	85	87,5	90	
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			85	90	95	100	85	90	95	100	
4	Nilai SAKIP Kecamatan			BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

Sumber : Evaluasi Renstra Tahun 2022

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja **Kecamatan** Wanaraja Tahun 2023 dan perkiraan capaian target **Kecamatan** Wanaraja Tahun 2019-2024 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan 2023 tersaji dalam Tabel 2.5 berikut

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	23
---	----

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wanaraja Sampai dengan Tahun 2023 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wanaraja

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					2.754.900.333	UNSUR KEWILAYAHAN				2.956.055.555	
7	01				2.754.900.333	KECAMATAN	Kecamatan Wanaraja			2.956.055.555	
7	01	01			1.982.462.733	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.087.055.555	5
7	01	01	2,01		18.450.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	19.500.000	
7	01	01	2,01	01	5.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000	
7	01	01	2,01	03	3.247.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	04	3.255.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	05	2.247.800	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	

						Perubahan DPA-SKPD					Perubahan DPA-SKPD				
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwangi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwangi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	1 Laporan	3.500.000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Laporan	1.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Laporan	3.000.000	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.999.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	0	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	4.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 unit	120.000.000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	25.000.000	
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	35.000.000	
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	60.000.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	117.851.040,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	403.000.000	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen	Kecamatan	Jumlah Paket	0 Paket	8.000.000	Penyediaan	Kecamatan	Jumlah Paket	0 Paket	0	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	25
---	----

					Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wanaraja	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wanaraja	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.000.000		
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.142.040	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.000.000		
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	21.000.000		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.938.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.983.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000		
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.787.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60.000.000		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000		
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0		
7	01	01	2,07	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	137.000.000		
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	137.000.000		
7	01	01	2,08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	38.000.415	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	45.000.000		
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa	Kecamatan	Jumlah Laporan	1	19.997.715	Penyediaan Jasa	Kecamatan	Jumlah Laporan	1	20.000.000		

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	26

					Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wanaraja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Wanaraja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.002.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	93.345.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	62.000.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.000.000	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	86.345.200	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	
7	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.669.815.378				15 orang/bulan	3.000.000.000	
7	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pegawai yang diberikan Gaji dan Tunjangan		1.669.815.378	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pegawai yang diberikan Gaji dan Tunjangan	15 orang/bulan	3.000.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan		330.999.600	PROGRAM PENYELENGGA RAAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan		755.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	27
---	----

					PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan			PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan			
7	01	02	2,01	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		120.999.800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	370.000.000	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	1 laporan	20.999.800	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	1 laporan	150.000.000	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	220.000.000	
7	01	02	2,02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		209.999.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1 dokumen	385.000.000	
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	196.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000	
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	1 laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	1 laporan	60.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	14.999.800	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1 Laporan	250.000.000	

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	100%	42.439.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	100%	50.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa		29.499.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 lembaga kemasyarakatan	50.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga kemasyarakatan	14.999.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	14.999.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	0	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		2.940.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	1 Doikumen	0	
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2.940.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja			9.999.900	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja		0		
7	01	03	2,06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan	0 keluarga	9.999.900	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan	0 keluarga	0	

							bermasyarakat,berban gsa dan bernegara					bermasyarakat,berban gsa dan bernegara							
7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		84.749.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		302.000.000			
7	01	04	2,0 1				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		69.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		190.000.000			
7	01	04	2,01	01			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	122.000.000			
7	01	04	2.01	02			Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 laporan	14.999.800	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 laporan	68.000.000			
7	01	04	2.02				Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Wanaraja			14.999.800	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Wanaraja			112.000.000			
7	01	04	2.02	01			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	14.999.800	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	112.000.000			
7	01	05					PROGRAM PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		214.999.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		434.000.000			

7	01	05	2,01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		214.999.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		434.000.000	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	14.999.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	23.000.000	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	61.000.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	350.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Desa Berkinerja Baik		99.249.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Desa Berkinerja Baik		328.000.000	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja			99.249.700	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja			328.000.000	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi administrasi tata	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi administrasi tata	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi	1 Dokumen	35.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	31
---	----

					Pemerintahan Desa		dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	33.000.000	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	4.250.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	45.000.000	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	1 Dokumen	64.999.900	Fasilitasi Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	1 Dokumen	35.000.000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	45.000.000	
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	45.000.000	
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	0	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	45.000.000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	45.000.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	14.999.800	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	0	
JUMLAH									2.754.900.333	JUMLAH				2.956.055.555	

Sumber : sipd

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	32
---	----

Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 menunjukkan dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 4.923.133.071,00 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 1.359.528.726,00 atau mencapai 27,61%. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 6

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahun 2023 TW II		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.497.903.271	1.221.660.926	27,16
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.500.000	6.761.400	17,56
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000		
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.500.000	-	0,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.500.000	-	0,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000	-	0,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.500.000	-	0,00

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.500.000	5.500.000	100,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000	1.261.400	22,93
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.181.981.951	1.110.179.047	50,88
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.172.211.951	1.110.179.047	51,11
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.770.000	-	0,00
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.314.000	18.965.000	98,19
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.314.000	18.965.000	98,19
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.709.600	50.898.800	41,48
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.073.000	5.000.000	49,64
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.194.900	19.567.500	51,23
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.236.300	4.618.000	50,00
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.861.900	5.461.900	50,28
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.932.400	2.012.400	51,17
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.941.100	7.239.000	48,45
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.440.000	7.000.000	37,96
1.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.030.000	-	0,00
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.084.660.000	27.999.750	1,34

1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	27.999.750	100,00
1.5.2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.056.660.000	-	0,00
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.657.720	5.150.429	14,44
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.538.720	2.812.429	29,48
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.840.000	-	0,00
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.279.000	2.338.000	11,53
1,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.080.000	1.706.500	11,32
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.080.000	1.706.500	11,32
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	112.630.100	20.764.600	18,44
2,1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90.630.100	8.261.100	9,12
2.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90.630.100	8.261.100	9,12
2,2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	22.000.000	12.503.500	56,83
2.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.000.000	12.503.500	56,83
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	68.780.500	19.888.300	28,92
3,1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	47.570.300	19.888.300	41,81

3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.570.300	8.966.000	39,72
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	5.922.300	39,48
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	5.000.000	50,00
3,2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	21.210.200	-	0,00
3.2.1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	21.210.200	-	0,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	136.075.900	42.670.200	56,21
4,1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	136.075.900	42.670.200	56,21
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.992.200	36.532.500	56,21
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000	-	0,00
4.1.3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21.083.700	6.137.700	29,11
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.343.300	14.913.800	23,54
5,1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.343.300	14.913.800	23,54

5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000	-	0,00
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48.343.300	14.913.800	30,85
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.400.000	39.630.900	89,26
6,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.400.000	39.630.900	89,26
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000	10.936.500	72,91
6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	14.400.000	13.694.400	95,10
6.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000	15.000.000	100,00
	JUMLAH	2.754.900.333	1.359.528.726	27,62

Sumber : LRA Kecamatan Juni 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 10 subkegiatan yang tidak mencapai target, hal ini dikarenakan belum terserapnya anggaran pada sub kegiatan tersebut Selain itu, terdapat 32 subkegiatan yang sudah mencapai target yang disebabkan karena penyerapan anggaran yang dapat disesuaikan

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah. Implikasi merupakan actor atau suatu kesimpulan dari target. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja. adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja Pada **Tahun 2023 (TW II)** berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	37
---	----

pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Wanaraja Pada umumnya.

- b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja Berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan/SKPD.

Selain itu, terkait perlu adanya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. Adapun factor perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut diatas antara lain :

Mengusulkan kekurangan anggaran pada tahun berikutnya

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini :

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	38

Tabel 2. 7

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4																16	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
		UNSUR KEWILAYAHAN																		
		KECAMATAN																		
					29.371.559.338		5.986.427.803		2.861.468.390	443.815.331	807.647.131				1.251.462.462		7.237.890.265	24,64	7.237.890.265	
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		26.393.965.711	21,03	5.549.381.603	96,96	2.524.709.390	388.009.831	728.709.531			4,23	1.116.719.362	44,23	6.666.100.965	25,26	6.666.100.965	Sekretaris
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		165.850.000	30,06	49.860.525	99,72	8.050.000	-	900.000			0,54	900.000		50.760.525	30,61	50.760.525	Sekretaris
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		165.850.000	30,06	49.860.525	99,72	8.050.000	-	900.000			0,54	900.000		50.760.525	30,61	50.760.525	Sekretaris
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap kecamatan		-										-		-		-	Sekretaris

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.467.298.800	20,54	2.149.631.817	95,24	2.180.793.390	375.150.626	706.727.802			10,34	1.081.878.428	3.231.510.245	30,87	3.231.510.245	Sekretaris	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		10.365.011.200	20,58	2.132.945.217	95,32	2.174.823.390	375.150.626	706.727.802			10,44	1.081.878.428	3.214.823.645	31,02	3.214.823.645	Sekretaris	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		102.287.600	16,31	16.686.600	85,41	5.970.000					-	-	16.686.600	16,31	16.686.600	Sekretaris	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		59.580.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	Sekretaris	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		59.580.000	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	Sekretaris	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	Sekretaris	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		910.421.625	22,44	204.338.000	98,37	80.590.130	10.352.950	16.606.000			2,96	26.958.950	231.296.950	25,41	231.296.950	Sekretaris	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan		39.480.462	23,20	9.160.000	100,00	3.925.800	980.000	985.800			4,98	1.965.800	11.125.800	28,18	11.125.800	Sekretaris	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan		464.286.596	23,52	109.220.900	97,41	27.000.200	5.539.800	4.435.850		2,15	9.975.650	119.196.550	25,67	119.196.550	Sekretaris		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sesuai Kebutuhan		50.191.838	27,19	13.645.300	100,00	2.710.630				-	-	13.645.300	27,19	13.645.300	Sekretaris		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan		42.971.210	21,32	9.162.200	95,13	7.267.100	608.550	1.843.550		5,71	2.452.100	11.614.300	27,03	11.614.300	Sekretaris		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Majalah/Koran/Media Massa		15.284.900	21,39	3.269.600	100,00	3.593.400	474.600	813.600		8,43	1.288.200	4.557.800	29,82	4.557.800	Sekretaris		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Sesuai Kebutuhan		88.792.700	21,08	18.720.000	100,00	12.293.000	1.000.000	4.117.200		5,76	5.117.200	23.837.200	26,85	23.837.200	Sekretaris		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Daerah		209.413.920	19,65	41.160.000	100,00	23.800.000	1.750.000	4.410.000		2,94	6.160.000	47.320.000	22,60	47.320.000	Sekretaris		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12.324.602.344	24,64	3.037.086.450	98,77	222.703.850	-	-		-	-	3.037.086.450	24,64	3.037.086.450	Sekretaris		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan		571.498.000	12,32	70.400.000	93,87	-				-	-	70.400.000	12,32	70.400.000	Sekretaris		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16			
		Dinas Jabatan	Dinas Jabatan																	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Sesuai Kebutuhan		66.200.000	-		18.972.180					-	-	-	-	-	Sekretaris		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sesuai Kebutuhan		99.300.000	-		10.347.670					-	-	-	-	-	Sekretaris		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Pengangkut Sampah		1.995.850.560	-							-	-	-	-	-	Sekretaris		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Tanah dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan		9.591.753.784	30,93	2.966.686.450	193.384.000					-	-	2.966.686.450	30,93	2.966.686.450	Sekretaris		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		139.647.442	19,36	27.041.536	21.172.020	2.182.255	4.475.729			4,77	6.657.984	33.699.520	24,13	33.699.520	Sekretaris		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan pembayaran rekening air, listrik dan telepon sesuai kebutuhan		36.756.720	17,14	6.301.536	8.711.920	1.317.255	1.810.629			8,51	3.127.884	9.429.420	25,65	9.429.420	Sekretaris		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai		23.413.460	9,82	2.300.000	3.240.000	365.000	345.000			3,03	710.000	3.010.000	12,86	3.010.000	Sekretaris		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16			
			Kebutuhan	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sesuai Kebutuhan		79.477.262	23,20	18.440.000	100,00	9.220.100	500.000	2.320.100			3,55	2.820.100		21.260.100	26,75	21.260.100	Sekretaris
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.326.565.500	3,50	81.423.275	79,89	11.400.000	324.000	-			0,01	324.000		81.747.275	3,51	81.747.275	Sekretaris
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran STNK Jumlah Servis Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Sesuai Kebutuhan		90.941.000	2,69	2.444.100	11,58	11.400.000	324.000				0,36	324.000		2.768.100	3,04	2.768.100	Sekretaris
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sesuai Kebutuhan		2.235.624.500	3,53	78.979.175	97,73	-					-	-		78.979.175	3,53	78.979.175	Sekretaris
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		811.713.700	23,09	187.417.700	90,78	83.002.600	5.750.000	29.129.500			34.879.500	42,02	222.297.200	27,39	222.297.200		

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12	13 = 6+12		14 = 13/5*100%		16		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	Kasi Pemerintahan
					649.037.100	27,12	176.041.500	93,17	74.793.000	5.540.000	27.847.000			33.387.000	209.428.500	32,27	209.428.500			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring Program Bansos, Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Kegiatan olahraga, pembinaan PBB, Penanggulangan COVID-19 dan Perkembangan Kesejahteraan Masyarakat		649.037.100	27,12	176.041.500	93,17	74.793.000	5.540.000	27.847.000			33.387.000	209.428.500	32,27	209.428.500			Kasi Kemasyarakatan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan		162.676.600	6,99	11.376.200	65,01	8.209.600	210.000	1.282.500			1.492.500	12.868.700	7,91	12.868.700			Kasi Pemerintahan
		Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Jumlah penyusunan SP/SOP pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan		162.676.600	6,99	11.376.200	65,01	8.209.600	210.000	1.282.500			1.492.500	12.868.700	7,91	12.868.700			Kasi Pelayanan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12		14 = 13/5*100%	16	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		623.581.023	10,22	63.743.500	100,00	84.582.900	18.146.500	16.626.000			34.772.500	41,11	98.516.000	15,80	98.516.000	Kasi Trantib
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		442.303.285	14,41	63.743.500	100,00	62.959.500	18.146.500	12.586.000			30.732.500		94.476.000	21,36	94.476.000	Kasi Trantib
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Sinergitas Dengan TNI/Polri		276.803.285	23,03	63.743.500	100,00	62.959.500	18.146.500	12.586.000			30.732.500		94.476.000	34,13	94.476.000	Kasi Trantib
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama		165.500.000	-			-					-		-	-	-	Kasi Trantib
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		181.277.738	-			21.623.400		4.040.000			4.040.000		4.040.000	2,23	4.040.000	Kasi Trantib

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	6		7		8	9	10	11	12		13 = 6+12		14 = 13/5*100%		16		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	Kasi Trantib
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Patroli Dalam Rangka Penegakan Perda/Perkada		181.277.738	-			-		4.040.000			4.040.000		4.040.000		2,23	4.040.000	
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		788.990.131	13,07	103.136.400	93,78	123.128.500	9.292.000	25.574.000			34.866.000	28,32	138.002.400	17,49	138.002.400	Kec Wanaraja	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		788.990.131	13,07	103.136.400	93,78	123.128.500	9.292.000	25.574.000			34.866.000		138.002.400	17,49	138.002.400	Kasi Pemerintahan	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang	Pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan		149.485.227	-			13.390.500							-		-	-	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)	10	11	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	16
		Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	jumlah pelaksanaan sosialisasi/bimtek wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		165.500.000	-			9.738.000									-	-	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopimcam Terkait Covid-19		474.004.904	21,76	103.136.400	93,78	100.000.000	9.292.000	25.574.000				34.866.000		138.002.400	29,11	138.002.400	Kasi Pemerintahan
5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tk Kecamatan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik		349.988.523	12,02	42.059.800	100,00	27.759.000	13.816.000	5.146.000				18.962.000	68,31	61.021.800	17,44	61.021.800	Kasi Pemerintahan

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)	
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12		14 = 13/5*100%	16		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		349.988.523	12,02	42.059.800	100,00	27.759.000	13.816.000	5.146.000			18.962.000	61.021.800	17,44	61.021.800			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan		192.259.033	21,88	42.059.800	100,00	13.373.000	840.000	5.146.000			5.986.000	48.045.800	24,99	48.045.800			Kasi Pemerintahan
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen RPTK		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-			Kasi PMD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		157.729.490	-	40.688.800	82,40	14.386.000	12.976.000	-			12.976.000	12.976.000	8,23	12.976.000			Kasi PMD
6	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan		403.320.250	10,09	40.688.800	82,40	18.286.000	8.801.000	2.462.100			11.263.100	51.951.900	61,59	51.951.900			Kasi PMD

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	I	II	III	IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
1	2	3	4			6		7	8	9	10	11	12		13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	Kasi PMD	
					333.117.250	6,40	21.309.900	71,03	18.286.000	8.801.000	2.462.100			11.263.100	32.573.000	9,78	32.573.000		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat desa		99.412.540	21,44	21.309.900	71,03	8.801.000	8.801.000			8.801.000	30.110.900	30,29	30.110.900	Kasi PMD		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		233.704.710	-			9.485.000		2.462.100			2.462.100	2.462.100	1,05	2.462.100	Kasi PMD	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		70.203.000	27,60	19.378.900	100,00	-					-	19.378.900	27,60	19.378.900	Kasi PMD	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		70.203.000	27,60	19.378.900	100,00						-	19.378.900	27,60	19.378.900	Kasi PMD	
															-				
														Rata-rata capaian kinerja (%)	95,19	7.237.890.265,00			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (Tahun 2021)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab (Bidang/Kasi)
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I	II		III	IV	K	Rp.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13 = 6+12	14 = 13/5*100%	16				
				K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp.	Rp. (000)	Rp. (000)			K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
Predikat kinerja												ST	ST					
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												47,60	3.618.945.132,50					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												R	SR					
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : aparaturnya pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja memadai, ketersediaan dana tepat waktu, dll																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja : proses administrasi pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan, kondisi iklim yang tidak mendukung, dll																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya**):																		

Sumber : Lap. Evaluasi renja, 2022

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	50
---	----

2.2.3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta Proyek Strategis Nasional (*Stunting*)

Adapun dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023. Untuk tujuan dan target SDGs yang tidak terkait dengan area SPM tidak diuraikan lebih lanjut dalam dokumen ini, karena tidak ada perubahan target. *Stunting* menjadi salah satu proyek strategis nasional, seiring dengan hal tersebut upaya Kabupaten Garut dalam menurunkan angka prevalensi *stunting* adalah dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan *Stunting* melalui penerbitan Keputusan Bupati Garut Nomor 440/KEP.189-KECAMATAN WANARAJA/2022, serta diterbitkannya Program TOSS (Temukan, Obati, Sayangi balita *Stunting*) guna mengatasi *stunting* di Kabupaten Garut. Program TOSS ini merupakan program lanjutan setelah BPS (Bulan Penimbangan *Stunting*) yang telah berjalan selama bulan Juni tahun 2022 dalam rangka mengobati balita *stunting* serta mencegah timbulnya kasus *stunting* baru di Kabupaten Garut.

Tabel 2.8
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencapaian SPM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
1. SPM PENDIDIKAN								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat	4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan	10 0%	97,4 3%	Kecamatan Wanaraja	Program Pengelolaan Pendidikan

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			untuk Semua	menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan penguasaan anak usia dini, penguasaan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	100 %	94,99%	Kecamatan Wanaraja	Program Pengelolaan Pendidikan
2. SPM KESEHATAN								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatk	Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan	1.4. Pada tahun 2030, menjamin	100 %	95,49%	Kecamatan Wanaraja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

No	SPM		TPB		Targ et Capa ian SPM 2022	Capa ian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapai an	Tujuan	Target				
		an layanan kesehatan	an dalam segala bentuk di manapun .	bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro				Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua	3.1. Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran	100 %	94,4 2%	Kecamatan Wanaraja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Targ et Capa ian SPM 2022	Capa ian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapai an	Tujuan	Target				
			Usia	hidup				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	100 %	98,89%	Kecamatan Wanaraja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan	100 %	96,21%	Kecamatan Wanaraja	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
				terjangkau bagi semua orang.				
3. SPM PEKERJAAN UMUM								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1* Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	100 %	87,02%	Kecamatan Wanaraja	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta	6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun. 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah	100 %	72,06%	Kecamatan Wanaraja	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			kelompok masyarakat rentan.	secara aman.				
4. SPM TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.3. Menggalakan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	100 %	100 %	Kecamatan Wanaraja	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan		100 %	82,99 %	Kecamatan Wanaraja	Program Penanggulangan Bencana

No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
			untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan					
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16. Mengutamakan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		100 %	41,99%	Kecamatan Wanaraja	Program Penanggulangan Bencana
5. SPM SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua,	100 %	100 %	Kecamatan Wanaraja	Program Rehabilitasi Sosial

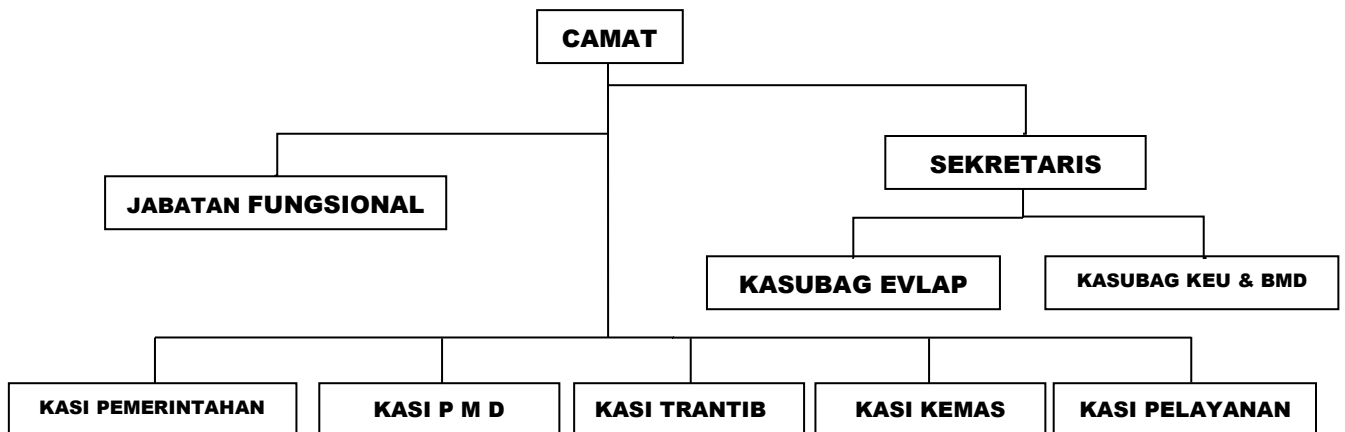
No	SPM		TPB		Target Capaian SPM 2022	Capaian SPM 2022	SKPD	Program
	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Tujuan	Target				
		diluar panti		termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi	1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.	1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	100 %	100 %	Kecamatan Wanaraja	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Kecamatan Wanaraja sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan/ Wanaraja Adapun tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wanaraja berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Kecamatan Wanaraja



Sumber: Perbup 27 Tahun 2021

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	59
---	----

Dengan Rincian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi sebagai berikut :
Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan bahwa :

Camat mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelayanan.

- 1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan, pengaturan, pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Seksi Pelayanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

- 2) Uraian tugas Camat adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsinya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
 - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan Perangkat Daerah yang tugas fungsinya di bidang penerapan atau penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dan kecamatan;
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah Daerah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- n. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
- o. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- r. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;

- s. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- t. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- u. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- y. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- z. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- aa. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas kecamatan;
- bb. menyelenggarakan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk sinkronisasi, keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- cc. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-

- undangan yang berlaku;
- dd. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- ee. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
- ff. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- gg. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja kecamatan;
- hh. hh. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karir staf;
- ii. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- jj. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- kk. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi Kepala unit pelaksana teknis pada Dinas dan unit pelaksana teknis pada Badan di lingkup wilayah kerjanya;
- ll. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- mm. mm. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas kecamatan; dan
- nn. nn. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Camat membawahkan:

- a. Sekretaris Kecamatan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	63

merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan urusan umum, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan barang milik daerah;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakanteknis lingkup kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
 - d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan kecamatan yang bersumber dari masing-masing Seksi;
 - e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

- pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dan Seksi Pelayanan;
 - i. melakukan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - j. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja kecamatan;
 - k. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
 - l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - n. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
 - o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
 - p. mengoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau secara langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
 - q. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
 - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - s. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
 - t. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - u. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah

- dinas yang berlaku;
- v. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
 - w. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - x. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
 - y. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi kecamatan;
 - z. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - aa. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - bb. bb. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan kecamatan sesuai dengan ketentuan;
 - cc. cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - dd. dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris membawahkan:
- a. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (1) Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya serta menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan bahan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta bahan umum, evaluasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian serta umum, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan penyediaan peralatan kerja serta menyusun bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan;
 - d. mengumpulkan bahan, data dan informasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas;
 - e. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan rencana kebutuhan/formasi pegawai, program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;
 - f. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai serta memfasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi, umum, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
 - g. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan rencana kerja kecamatan;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;

- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan;
 - j. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - m. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - n. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - q. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - r. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - s. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dan barang

- milik daerah;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- (3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja subbagian keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
 - c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan dan barang milik daerah;
 - g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
 - h. melaksanakan akuntansi keuangan;
 - i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan barang milik daerah;
 - j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah;
 - m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - p. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - q. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - r. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;

- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Seksi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data administrasi kependudukan dan pertanahan;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
- f. menyiapkan bahan dan melaksana koordinasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- i. melaksanakan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- j. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan dan pendayagunaan aset desa dan aset daerah yang dikelola oleh desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa;
- l. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Lurah dan perangkat desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan batas desa antar desa antar satu kecamatan;
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- w. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- x. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa;
- y. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan;
- z. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat kecamatan;
- aa. melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan dalam satu kecamatan;
- bb. bb. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan Kepala Desa dan program-program lainnya;
- cc. cc. melaksanakan koordinasi dengan seksi lainnya dalam rangka

pemberian pelayanan kepada masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;

- dd. melaksanakan fasilitasi penyusunan APBDes;
 - dd. ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemerintahan;
 - ee. ii. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - ff. jj. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - gg. kk. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya; ll. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - hh. mm. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - ii. nn. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - jj. oo. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - kk. pp. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - ll. qq. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - mm. rr. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Kesejahteraan Masyarakat;

- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Kesejahteraan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja kecamatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kehidupan gotong royong, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengembangan potensi desa dan kelurahan, organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kerukunan hidup beragama;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan dan data kesejahteraan masyarakat lainnya;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis, unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - k. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - m. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui

- kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- n. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - o. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - p. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - q. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasisesuai dengan tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (3) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi Camat dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat serta unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi;
- f. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa atau kerja sama desa dan kelurahan dengan pihak ketiga;
- g. menyiapkan bahan dan data Usaha Kecil Menengah (UKM), Koperasi serta perekonomian lainnya;
- h. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- i. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi serta pendayagunaan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan di wilayah kecamatan;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- n. melaksanakan fasilitasi kegiatan kader pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan;
- o. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- p. melaksanakan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan;
- q. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di wilayah kecamatan baik yang

- dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- r. melaksanakan fasilitasi, monitoring penyelenggaraan pembangunan yang bersumber dari APBDes dan bantuan keuangan lainnya;
 - s. melaksanakan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
 - t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
 - u. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga /instansi dalam lingkup tugasnya;
 - v. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - w. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - x. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - y. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - z. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - aa. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - bb. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - cc. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (4) Uraian tugas kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. melaksanakan tugas tambahan *ex-officio* Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi

- masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dan pencegahan serta penanggulangan bencana alam;
- j. menyiapkan bahan dan data organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
 - m. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
 - n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 - o. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 - p. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - q. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - r. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - s. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - t. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pelayanan.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pelayanan;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pelayanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan tugasnya; dan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pelayanan.

(3) Uraian tugas kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pelayanan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data Seksi Pelayanan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja kecamatan;
- d. menyiapkan bahan dan teknis penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana tempat pelayanan untuk kenyamanan dan kepuasan masyarakat;
- f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan survei indek kepuasan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Seksi Pelayanan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/instansi dalam lingkup tugasnya;
- j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas para bawahan melalui penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau

- sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
 - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.9 sebagai berikut :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	80

Tabel 2. 9**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SKM			85	90	95	100	84,5	84,41	85	87	
2	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan			85	90	95	100	75	75	85	90	
3	Tingkat Partisipasi			85	90	95	100	85	90	95	100	

	Masyarakat Dalam Pembangunan											
4	Nilai SAKIP Kecamatan			85	90	95	100	77,20	67,20	80	85	
<i>Sumber : Pengolahan Data Kecamatan/ SKPD, 2023</i>												

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut pada tahun 2023, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut.

1. Penanganan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, penanganan stunting, penurunan Angka Kematian Ibu, penanganan Bencana Alam dan Non Alam;
2. Peningkatan Pelayanan Publik dan penguatan demokrasi, moral, etika, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan gender, kekerasan pada perempuan dan pemenuhan hak anak;
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial;
5. Penanganan kebencanaan baik alam maupun non alam
6. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, industri dan perdagangan, serta pariwisata dan jasa produktif lainnya;

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Wanaraja bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan pelayanan publik
2. Belum Optimalnya penataan kelembagaan dan perangkat desa
3. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Belum optimalnya penanggulangan Stunting.
5. Belum optimalnya penguatan demokrasi.

Adapun hambatan dalam menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang selama ini diantaranya :

1. Belum meratanya kemampuan SDM dan Sarana Prasarana Pelayanan di tiap desa.
2. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada kurang apdet
3. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	83
--	----

4. Keterbatasan lapangan pekerjaan.
5. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang Stunting.
6. Keterbatasan masyarakat dalam penerimaan informasi tentang demokrasi.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Kecamatan Wanaraja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Wanaraja serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja.

Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	84
---	----

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
2. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 16 kegiatan, yang terdiri dari 39 sub kegiatan;
3. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	85

Tabel 2.
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota Garut

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Wanaraja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7					2.754.900.333	UNSUR KEWILAYAHAN				2.956.055.555	
7	01				2.754.900.333	KECAMATAN	Kecamatan Wanaraja			2.956.055.555	
7	01	01			1.982.462.733	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	1.087.055.555	
7	01	01	2,01		18.450.900	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	19.500.000	
7	01	01	2,01	01	5.700.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.000.000	
7	01	01	2,01	03	3.247.800	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
7	01	01	2,01	04	3.255.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	3.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	86
--	----

							Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.247.800	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwangi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Banyuwangi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"	1 Laporan	3.500.000		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Laporan	1.999.800	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	1 Laporan	3.000.000		
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	4.999.800	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	0		
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	4.999.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0		
7	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 unit	120.000.000		
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	25.000.000		
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian	Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian	1 paket	0	Pengadaan Pakaian	Kecamatan	Jumlah Paket Pakaian	1 paket	35.000.000		

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	87
--	-----------

					Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Wanaraja	Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Wanaraja	Dinas beserta Atribut Kelengkapan				
7	01	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	0	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen	60.000.000		
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	117.851.040,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	403.000.000		
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0		
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	170.000.000		
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6.142.040	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.000.000		
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	21.000.000		
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.938.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.983.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000		
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.787.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	60.000.000		
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	35.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	60.000.000		
7	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0		
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	40.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	137.000.000		

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	88
--	-----------

					Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah unit Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	137.000.000	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	38.000.415	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	45.000.000	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.997.715	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.000.000	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.002.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	93.345.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	62.000.000	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	7.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.000.000	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	36.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	89
--	-----------

7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	86.345.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
7	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.669.815.378				15 orang/bulan	3.000.000.000
7	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pegawai yang diberikan Gaji dan Tunjangan		1.669.815.378	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pegawai yang diberikan Gaji dan Tunjangan	15 orang/bulan	3.000.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wanaraja	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		330.999.600	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Wanaraja	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		755.000.000
7	01	02	2,0	1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		120.999.800	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	370.000.000
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	1 laporan	20.999.800	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait"	1 laporan	150.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	220.000.000
7	01	02	2,0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		209.999.800	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 dokumen	385.000.000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	90
--	----

					Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan			
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	196.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	75.000.000	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	1 laporan	0	Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar Pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	1 laporan	60.000.000	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	14.999.800	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	250.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	100%	42.439.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Wanaraja	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	100%	50.000.000	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa		29.499.600	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 lembaga kemasyarakatan	50.000.000	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga kemasyarakatan	14.999.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga kemasyarakatan	50.000.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	14.999.800	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	0	
7	01	03	2,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan		2.940.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan	1 Doikumen	0	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	91
--	----

					Masyarakat (PPKM)		Masyarakat (PPKM)			Masyarakat (PPKM)		Masyarakat (PPKM)			
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2.940.000	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	0	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja			9.999.900	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Wanaraja		0		
7	01	03	2.06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berban gsa dan bernegara	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berban gsa dan bernegara	0 keluarga	9.999.900	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berban gsa dan bernegara	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalana Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat,berban gsa dan bernegara	0 keluarga	0	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		84.749.800	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum		302.000.000	
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		69.750.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		190.000.000	
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.750.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	122.000.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan	1 laporan	14.999.800	Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan	1 laporan	68.000.000	

							tokoh agama dan tokoh masyarakat					tokoh agama dan tokoh masyarakat					
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Wanaraja			14.999.800	Koordinasi Penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kecamatan Wanaraja					112.000.000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	14.999.800	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan			112.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat		214.999.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Wanaraja	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat				434.000.000	
7	01	05	2,01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat		214.999.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat				434.000.000	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1 Orang	14.999.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1 Orang			23.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	93

					Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	0	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1 Orang	61.000.000	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	200.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	350.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Desa Berkinerja Baik		99.249.700	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Wanaraja	Persentase Desa Berkinerja Baik		328.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja			99.249.700	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja			328.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	1 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	1 Dokumen	35.000.000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset desa	1 Dokumen	33.000.000	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	4.250.000	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan	1 Laporan	45.000.000	
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi	Kecamatan	Jumlah Dokumen	1	64.999.900	Fasilitasi	Kecamatan	Jumlah Dokumen	1	35.000.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	94
---	----

					Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Wanaraja	fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen			Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Wanaraja	fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan tugas Kepala desa dan Perangkat desa	Dokumen								
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	0		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	45.000.000							
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	0		Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	45.000.000							
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	0		Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	45.000.000							
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	0		Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Wanaraja	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	45.000.000							
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	14.999.800		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Wanaraja	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	0							
JUMLAH									2.754.900.333		JUMLAH									2.956.055.555		

Tabel 2. 10

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	95
---	----

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
7																			
7	01																		
7	01	01																	
7	01	01	2,01																
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		4.000.000
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	3.247.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.000.000
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	3.255.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.000.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.247.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.000.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %		3.500.000
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Dokumen Laporan Laporan Evaluasi Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan,	Kab. Garut, Wanaraja, Semua	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.999.800	Dana Transfer Umum-		Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %		3.000.000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	96
--	----

						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kinerja SKPD	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desa					Dana Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.674.815.378					1.800.000.000
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	16 Orang	12 Bulan	1.669.815.578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.800.000.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Laporan	12 Bulan	4.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	
7	01	01	2,06			Administrasi Umum Perangkat Daerah							117.851.040					382.000.000.
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	170.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	6.142.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Paket	12 Bulan	8.938.300	Dana Transfer Umum-Dana		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang	100 %	5.000.000

						Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		Perangkat Daerah						Alokasi Umum		Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	2.983.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	75.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	39.787.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40.000.000					137.000.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Unit	12 Bulan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	137.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38.000.415					20.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	19.997.715	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	20.000.000
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Jasa	Kab. Garut, Wanaraja, Semua	100 %	12 Laporan	12 Bulan	18.002.700	Dana Transfer Umum-		Persentase Pemenuhan Urusan	100 %	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	98
--	-----------

						Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Kantor yang Disediakan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Desa					Dana Alokasi Umum		Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								93.345.200				112.345.200
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Garut, Kecamatan Wanaraja,	100 %	9 Unit	12 Bulan	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	26.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut, Kecamatan Wanaraja	100 %	1 unit	12 bulan	86.345.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	86.345.200
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								330.939.600				495.000.000
7	01	02	2,01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								120.939.800				370.000.000
7	01	02	2,01	01	Koordinasi / sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan.	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, dan Perangkat Daerah	Wanaraja, Semua Desa	100%	1 dokumen	12 bulan	20.939.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	150.000.000
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Pelaksanaan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 dokumen	12 bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	220.000.000
7	01	02	2,02			Penyelenggaraan Urusan								209.999.800				125.000.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja SKPD Wanaraja Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra SKPD Wanaraja tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	103
--	-----

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra SKPD Wanaraja yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	104
---	-----

4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
 - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	105

4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	106
---	-----

Demokrasi;

- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional dan amanah, serta meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan.

Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai ketentuan yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Tujuan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sebagaimana telah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	107

ditetapkan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 208 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 74 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Wanaraja Tahun 2019-2024 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah, dengan indikator :
 - Indek Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator
 - Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah SKPD Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran SKPD Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan SKPD Pasiwangi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator :
 - Nilai SKM.
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan, dengan indikator :
 - Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dengan indikator :
 - Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, dengan indikator :
 - Nilai SAKIP Kecamatan

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Wanaraja dapat dilihat pada tabel berikut :

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	108

Tabel 3. 1

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan/SKPD Kecamatan Wanaraja Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan	Nilai SKM	82,5
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	75
			Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	95
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B

Sumber : Perubahan Renstra Wanaraja, 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan/SKPD Wanaraja Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	109
---	-----

perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan; perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	KECAMATAN WANARAJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000
2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000
3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.500.000
4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.500.000
5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000
6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000
7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	110
--	-----

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
8			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.185.254.430
9				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.770.000
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.999.900
11			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.406.000
12				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.194.900
13				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.065.700
14				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.861.900
15				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.932.400
16				Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.941.100
17				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.440.000
18				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	17.030.000
19			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	21.844.700
20				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.205.500
21				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.538.720
22			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.840.000
23				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.679.000
24				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.080.000

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
25			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.537.600
26		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.000.000
27			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.966.000
28		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000
29				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000
30			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	64.992.200
31		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50.000.000
32				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	21.083.700
33			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
34		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	200.000.000
35				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.000.000
36		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	13.694.400
37				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.000.000
Total	6	15		2.754.900.333	

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Wanaraja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 6 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
 - d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
 - e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
2. Jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	113
---	-----

3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 38 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.754.900.333,-, yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Garut. Adapun rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023 disertai indikator program dan kegiatan serta sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah tersaji pada table berikut:

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	114

Tabel 3. 3

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Wanaraja

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 Kecamatan Wanaraja

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN													
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	5.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	4.000.000	
7	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	3.247.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.000.000	
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	3.255.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.000.000	
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	2.247.800	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.000.000	
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan	Pemenuhan	Jumlah Dokumen	Jumlah	Kab. Garut,	100 %	1	12 Bulan	2.000.000	Dana	Pemenuhan	100 %	3.500.000	

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	115
--	-----

					Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wanaraja, Semua Desa		Dokumen			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan		
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	1.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	3.000.000
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.674.815.378				1.800.000.000	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	16 Orang	12 Bulan	1.669.815.578	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	1.800.000.000
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Laporan	12 Bulan	4.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								117.851.040				382.000.000.	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	
7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	17.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	170.000.000

7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Paket	12 Bulan	6.142.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	12.000.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Paket	12 Bulan	8.938.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	5.000.000
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Dokumen	12 Bulan	2.983.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	75.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	39.787.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	60.000.000
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								40.000.000				137.000.000
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Unit	12 Bulan	40.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100 %	137.000.000
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa								38.000.415				20.000.000

						Kecamatan										Tingkat Kecamatan		
7	01	02	2,01		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Pelayanan Publik	Jumlah Pelaksanaan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 dokumen	12 bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan	100%	220.000.000
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								209.999.800					125.000.000
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Laporan	12 Bulan	195.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	75.000.000
7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Laporan	12 Bulan	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	50.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								39.999.500					50.000.000
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								29.999.600					50.000.000
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Lembaga	9 Desa	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	100 %	50.000.000
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas	Persentase	Jumlah Lembaga	Jumlah	Kab. Garut,	100 %	1	9 Desa	14.999.800	Dana		Persentase		

					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan	Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Wanaraja, Semua Desa		Lembaga			Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan		
7	01	03	2,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									9.999.900				
7	01	03	2,06	01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek Kehidupan Bermasyarakat , berbangsa dan bernegara.	Persentase Masyarakat Desa dan Desa yang dapat diberdayakan			Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	9.999.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								84.749.800					234.000.000
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								69.750.000					234.000.000
7	01	04	2,01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12 Bulan	69.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	122.000.000
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								14.999.800					
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	12 Laporan	12	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	112.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								214.999.800					373.000.000
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								214.999.800					373.000.000

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	120
--	-----

Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	100 Orang	12 Bulan	14.999.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	23.000.000
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	12 Bulan	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	350.000.000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								84.249.900				115.000.000
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								84.249.900				115.000.000
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Dokumen	1 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000
7	01	06	2,01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut, Wanaraja, Semua Desa	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	45.000.000
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam	Kab. Garut, Wanaraja,	100 %	1 Laporan	1 Laporan	64.999.900	Dana Transfer	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	35.000.000

					Perangkat Desa		Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Semua Desa					Umum-Dana Alokasi Umum				
JUMLAH														JUMLAH				

Sumber : RKPD Perubahan, SIPD 2023

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	122

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja SKPD/Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Wanaraja; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan stunting di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	123
--	-----

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023	124
---	-----

<i>Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Wanaraja Tahun 2023</i>	125